LAPORAN PENELITIAN MANDIRI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KETANGGUHAN MASYARAKAT DESA TANGGUH BENCANA DI PROVINSI RIAU

PENELITI

RATIH SETYO RINI, S.SOS., M.M. / 0301077506
PUJI YUNIARTI, S.E., M.M. / 0315067703
WIWIN WIANTI, S.E., M.M. /0421107904

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

AGUSTUS 2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian	: Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Provinsi Riau
2. Peneliti	
a. Nama Lengkap	: Ratih Setyo Rini, S.Sos., MM
b. NIDN	: 0301077506
c. Jabatan Fungsional	: Asisten Ahli
d. Program Studi	: Administrasi Bisnis (D3)
e. Alamat Institusi	: Jl. Kramat Raya No. 98, Jakarta Pusat
f. Telpon/Faks/E-mail	: (021) 23231170
3. Jumlah Anggota	
a. Nama Anggota 1	: Puji Yuniarti, S.E., M.M.
b. Nama Anggota 2	: Wiwin Wianti, S.E., M.M.
4. Biaya Penelitian	: Rp. 4.800.000,-
5. Sumber Dana Penelitian	: (Mandiri)

Jakarta, 1 Agustus 2021

Mengetahui,
Rektor

Peneliti,

(Dr. Mochamad Wahyudi, M.M., M.Kom., M.Pd.)
NIP. 199810339

(Ratih Setyo Rini, S.Sos., M.M.)
NIP. 201101018

Menyetujui,
Ketua LPPM

Cap LPPM dan tanda tangan

(Taufiq Baidawi, M.Kom.)
NIP. 200304891

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Sampul i
Halaman Pengesahan ii
Daftar Isi iii
Ringkasan iv

BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Ruang Lingkup 6
1.4. Tujuan Penelitian 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. Pengertian *Monitoring* 7
2.2. Pengertian Evaluasi 7
2.3. Pengertian Desa Tangguh Bencana 7
2.4. Pengertian Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) 8

BAB III METODE PENELITIAN 9
3.1. Lokasi Penelitian 9
3.2. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisis Data 9

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 10
4.1. Lokasi Kegiatan 10
4.2. Tahapan Kegiatan 10
4.3. Capaian Kegiatan 14

BAB V KESIMPULAN
5.1. Kesimpulan 17
5.2. saran 17

DAFTAR PUSTAKA 18

LAMPIRAN 20
Lampiran 1. Realisasi Biaya Penelitian 20
Lampiran 2. Biodata Peneliti 21

RINGKASAN

Penelitian ini bersifat deksriptif kualitatif dengan maksud menggambarkan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan dapat memberikan evaluasi pada beberapa aspek penilaian, dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan melalui wawancara langsung dengan pelaku kegiatan serta membaca literatur melalui dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan. Secara umum semua tahapan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana dilaksanakan di Provinsi Riau, yaitu di Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Siak, kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan dan 3 (tiga) desa/kelurahan Sementara di Kabupaten Kampar, kegiatan dilaksanakan di 2 (dua) kecamatan dan 2 (dua) desa/kelurahan. Kegiatan Pemberdayaan dan Pegembangan Ketangguhan Masyarakat di Provinsi Riau dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan, yaitu Sosialisasi Kabupaten, Sosialisasi Desa, Kemitraan Dengan Pihak Lain, Monitoring oleh PJOK, dan Profil Desa/Kelurahan. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau. secara umum telah mencapai tujuannya, namun selama pelaksanaan tahapan kegiatan telah menghadapi beberapa persoalan. Salah satu saran terhadap perbaikan kegiatan adalah menyediakan anggaran untuk pelatihan (kontiniuitas) pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga relawan Desa dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Letak geologis Indonesia menjadikannya sebagai daerah rawan bencana. Pergerakan tiga lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, dan lempeng pasifik di bagian Barat, menyebabkan gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif. Keadaan ini diperburuk oleh perubahan iklim yang tidak menentu. Selain itu, peningkatan perekonomian Indonesia yang memicu tumbuh suburnya pembangunan industri, pemukiman, perkebunan, tempat perbelanjaan, jalan, dan fasilitas umum lainnya hampir di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan makin banyaknya daerah rentan bencana banjir dan tanah longsor. Sesuai data yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga 2013, wilayah terjadinya bencana di Indonesia mengalami perluasan ((BNPB, 2018).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai mandatori Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bertanggungjawab terhadap berlangsungnya penanggulangan bencana di Indonesia (Mendagri, 2007). Untuk mencapai visi Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana, BNPB menjalankan berbagai program pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Program peningkatan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan bencana. Pada tahun 2014, perkembangan pelaksanaan program tersebut menunjukkan adanya peningkatan, di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, antara lain telah terbentuknya 64 masyarakat tangguh bencana di 28 Provinsi dan 34 kabupaten/kota. Sementara pada tahun 2015 telah terbentuk masyarakat tangguh bencana di 31 Provinsi dan 45 kabupaten/kota. Dan pada tahun 2016, pembentukan masyarakat tangguh bencana dilaksanakan di 30 Provinsi dengan 50 kabupaten/kota (BNPB, 2014). Pelaksanaan ketangguhan masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi fokus tersendiri sehingga dibutuhkan monitoring dan evaluasi kegiatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Hasil Pemantauan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau?
2. Bagaimana Hasil Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau?

1.3. Ruang Lingkup

Dalam Penulisan proposal ini penulis membahas tentang Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana Provinsi Riau. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah ini dapat memberikan masukan keilmuan, menambah wawasan, dan pengetahuan tentang Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Bersama masyarakat, khususnya Kegiatan Pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Monitoring*

Pengertian monitoring atau pemantauan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin (Ramadhani, 2019).

2.2 Pengertian Evaluasi

Evaluasi (Peraturan Pemerintah, 2006) adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar (Munthe, 2015) Penilaian (Evaluasi) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring (Jaya et al., 2018). Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian (Hasbullah & Anam, 2019).

2.3 Pengertian Desa Tangguh Bencana

Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan (BNPB, 2012). Kriteria ketangguhan desa dari atas ke bawah adalah Desa Tangguh Utama, Desa Tangguh Madya, dan Desa Tangguh Pratama

2.4 Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)

Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, mendefinisikan hutan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungannya, yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan (Pemerintah RI, 1999). Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh- tumbuhan dan hewan yang hidup dalam lapisan dan permukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis. Sementara kebakaran hutan menurut (Saharjo, 2003), merupakan pembakaran yang penjalaran apinya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam seperti serasah, rumput, ranting /cabang pohon mati yang berdiri, *log* (kayu bulat), tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tangguh Bencana, secara khusus di Provinsi Riau.

3.2 Teknik Pengumpulan data dan Analisis Data

Dalam Teknik pengumpulan data-data dan analisis data guna menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

   Dalam metode ini penulis mengadakan kunjungan langsung ke ke Desa Tangguh Bencana untuk melakukan pengamatan, pencatatan dan pengumpulan data guna mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

b. Wawancara

   Penulis mengadakan wawancara di dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian.

c. Kepustakaan

   Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari beberapa buku, sarana perpustakaan dan catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan tema yang diajukan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Wilayah Barat berfokus pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kegiatan Pemberdayaan dan Pegembangan Ketangguhan Masyarakat Wilayah Barat, khususnya di Provinsi Riau, berada di 2 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 kecamatan dan 5 Desa/Kelurahan. Secara terperinci lokasi kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Lokasi Kegiatan Pemberdayaan dan Pegembangan Ketangguhan Masyarakat di Provinsi Riau

Provinsi	Kota / Kabupaten	Kecamatan	Desa / Kelurahan
Riau	Siak	Siak	Rawang Air Putih
		Sungai Apit	Mengkapin
		Dayun	Dayun
	Kampar	Tapung	Karya Indah
		Kampar Kiri Hilir	Mentulik

4.2. Tahapan Kegiatan

Tahapan Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan dan Pegembangan Ketangguhan Masyarakat di Provinsi Riau dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan, yaitu: 1. Sosialisasi Kabupaten, yaitu kegiatan untuk memperkenalkan program desa tangguh bencana kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Riau. 2. Sosialisasi Desa dan Pembentukan Pokja (Kelompok Kerja), yaitu yaitu kegiatan untuk memperkenalkan program desa tangguh bencana kepada para pemangku kepentingan di tingkat desa yang berada di Kabupaten Riau. 3. Kemitraan dengan Pihak Lain, yaitu kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi

untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain (BNPB, 2012) 4. Monitoring Kegiatan Destana oleh PJOK, yaitu Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang diberikan kewenangan dalam pengelolaan kegiatan. 5. Profil Desa / kelurahan, yaitu gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangankemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Tabel 2. Tahapan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Provinsi Riau (Kabupaten Kampardan Kabupaten Siak)

No	Kegiatan	Permasalahan	Analisis	Sarana
1	Sosialisasi Kabupaten	1. Materi yang disampaikan tentang Destana sangat sedikit dan singkat. 2. Pihak swasta tidak diundang. Peserta yang diundang hanya sesuai juknis.	Pada acara soskab semua pihak terkait diundang khusunya satgas penanggulangan karlahut, namun penyampaian materi pokok tentang destana oleh BPBD Propinsi sangat singkat bahkan sempat mengalami gangguan teknis (mati lampu). Selanjutnya acara lebih mengarah pada evaluasi karlahut.	1. Soskab agar dilaksanakan lebih panjang lagi waktunya dan apabila digabung dengan acara lain agar dibagi waktunya dalam sehari tersebut dari pagi sampai sore. 2. Mengundang juga pihak swasta yang ada di kabupaten. 3. Usulan secara komprihensif (menyikapi secara menyeluruh) terhadap terhadap kegiatan ini untuk perbaikan program Destana ke depan

2	Sosialisasi Desa dan pembentukan Pokja	1. Partisipasi Warga dan kaum perempuan masih kurang 2. Keterlibatan perempuan dalam pokja masih kurang. Ada yang 5 ada yang 6 orang.	1. Pelaksanaan sosdes sudah mengundang warga bahkan undangannya setiap rumah. 2. Sebelum sosdes sudah dilakukan identifikasi orang2 yang akan masuk pokja dan saat sosdes diumumkan siapa saja yang menjadi pokja selain itu juga warga mengusulkan pokja.	1. Sosialisasi tidak hanya dilakukan secafa formal mengumpulkan warga dib alai desa namun juga kepada Warga yang tidak hadir dan belum mengetahui program destana pada saat acara wirid yasin kaum ibu, pertemuan pkk, karangtaruna dsb. 2. Agar dalam sosdes diulang kembali berapa persen keterlibatan perempuan dalam pokja. 1. Disesuaikan jadwalnya dengan keadaan warga setempat kapan mereka sering rapat 3. Perlu dukungan dari pemerintah kabupaten (BPBD) guna kelangsungan hidup forum sebelum mereka bisa mandiri dan juga agar perempuan lebih semangat lagi untuk terlibat

3	Kemitraan dengan Pihak Lain	Menbangun Kemitraan dengan pihak lain	Kemitraan dengan pihak lain sudah terjain, namun MOU belum di tanda tangani, pada saat soskab tidak diundang, kemitraan dengan swasta sudah ada namun dengan desa lain, dalam bentuk pelatihan.	1. Pihak swasta sudah melaukan kemitraan namun sifatnya insidentil 2. Membuat MOU dengan pihak swasta yang sudah sering memberikan bantuan agar ada kerjasama yang lebih intensif lagi
4	Monitoring kegiatan Destana oleh PJOK	Dalam hal ini PJOK sudah bekerja secara maksimal guna terlaksananya program Destana ini	PJOK dalam hal ini sangat berperan dalam terlakananya kegiatan ini. PJOK benar-benar mencurahkan segenap kemampuanya guna membangkitkan kesadrana masyarakat akan pentingnya mengurangi resiko dari sebuah bencana yang mungkin akan terjadi	1. Dalam hal monitoring kegiatan Destana oleh PJOK perlu ditambah staf yang bisa membantu PJOK dalam mengawasi dan memonitor semua proses apakah sudah benar sesuai dengan Juklak, jika belum mereka dpat mengarahkan agar sesuai dengan juklak, dalam hal ini bisa sedikit memperingan tugas dari PJOK. 2. Diperlukan individu – individu yang mau bekerja

				keras dalam melaksanakan monitoring kegiatan Destana ini
5	Profil Desa	Profil desa belum lengkap	Fasilitator kurang menggali lebih dalam lagi tentang profil desa terbaru, hanya berdasarkan dokumen yang ada di kantor desa (profil dari monografi desa / profil dari KKN}	3. Pada saat membuat peta kajian dapat digali lebih dalam lagi profilnya 4. Data dari hasil kajian dikompilasi dengan data dari sekdes

4.3. Capaian Kegiatan

Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau dengan fokus bencana adalah kebakaran lahan dan hutan (karlahut). Kegiatan untuk mencapai tujuan Program Destana telah dapat dilakukan sepenuhnya meskipun menghadapi beberapa kendala pada tahap awalnya. Keterlambatan dana diantisipasi dengan strategi percepatan, untuk mengejar ketertinggalan tahapan kegiatan. Percepatan dilakukan dengan menggabung kegiatan yang dapat digabung dalam satu kegiatan dan waktu kegiatan yang lebih dipadatkan.

Percepatan juga dilakukan dengan melakukan kegiatan tidak hanya pagi/siang hari, tetapi juga sampai malam hari. Selama pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di Provinsi Riau, seluruh desa/kelurahan telah melaksanakan 5 (lima) kegiatan utama, yaitu :

1. Koordinasi dan sosialisasi di kabupaten/kota
2. Persiapan pelaksanaan program di desa/kelurahan,
3. Pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan, dan
4. Seminar di kabupaten/kota untuk membangun keberlanjutan dan kerjasama para pihak serta
5. pelatihan relawan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten/Kota yang pesertanya berasal dari desa-desa yang difasilitasi.

Aspek Administrasi

Sistem pertanggungjawaban Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana dilakukan melalui pelaporan berjenjang, dari laporan fasilitator, laporan forum di tingkat desa/kelurahan, dan laporan BPBD. Laporan yang dihasilkan ada 2 (dua), yaitu berupa laporan narasi kegiatan dan laporan keuangan. Pelaporan dilakukan baik secara formal (laporan tertulis / hard cover) maupun secara informal melalui kemudahan media komunikasi. Namun demikian laporan hanya dilakukan secara manual karena aplikasi e-monev masih dalam penyempurnaan.

Partisipasi

Keanggotaan pokja dan forum telah melibatkan semua perwakilan dan kelompok yang ada di wilayah desa/kelurahan tangguh bencana. Fasilitator secara umum memiliki pemahaman tentang konteks khas masyarakat desa lokasi Destana dan mampu menciptakan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat yang terlibat pada pertemuan-pertemuan yang diadakan. Pelibatan masyarakat dalam program Destana telah menumbuhkan keberanian dan memberikan peningkatan kapasitas terutama dalam berdialog dan menganalisis secara bersama persoalan kebencanaan.

Keterlibatan Perempuan (Kesetaraan Gender)

Dalam setiap program perlu adanya keseimbangan keterlibatan perempuan. Sebagian masyarakat Indonesia yang bias gender dimana perempuan lebih banyak berkiprah di ruang domestik, menyebabkan perempuan dan kelompok rentan yang menjadi korban bencana. Keberadaan perempuan dan anak-anak yang lebih banyak di rumah dapat menyulitkan mendapatkan akses informasi di saat bencana terjadi. Sementara laki-laki yang lebih banyak berperan di ruang publik menghadapi resiko yang lebih kecil. Sehingga melibatkan perempuan secara langsung dalam setiap proses upaya penanggulangan bencana menjadi suatu keharusan. Pada kegiatan di Provinsi Riau, keterlibatan perempuan cukup terwakil, di mana dalam setiap kegiatan baik di level kabupaten maupun di desa tidak membatasi akses perempuan untuk terlibat sebagai anggota organisasi kelembagaan, dalam pokja maupun forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Keanggotaan perempuan dalam forum lebih maksimal karena lebih aktif menghadiri undangan pertemuan, tidak disibukkan

dengan urusan di kantor. Diseminasi informasi oleh kalangan ibu-ibu di forum juga positif karena ibu-ibu juga terlibat dalam aktifitas keanggotaan di forum lainnya sehingga dapat lebih cepat memberikan informasi kepada masyarakat.

Pihak Lain Yang Terlibat

Perguruan tinggi adalah mitra pemerintah dalam memberikan masukan/rekomendasi program penanggulangan bencana yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Keterlibatan dalam Program Destana berupa kehadiran akademisi (dosen) dari perguruan tinggi setempat sebagai narasumber di beberapa kabupaten/kota. Namun keterlibatan swasta dan perguruan tinggi belum dilibatkan secara maksimal sehingga peran ini belum nampak secara utuh.

E-monev

Pelaksanaan E-Monev merupakan upaya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelaporan sehingga progress tahapan kegiatan bisa dipantau kapan pun, di mana pun secara cepat (tepat waktu) sebagai bahan analisis pencapaian kegiatan. Aplikasi berbasis website belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena masih dalam tahap penyempurnaan, sehingga belum semua fasilitator bisa mengakses E-Monev.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan’

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Ketangguhan Masyarakat Desa Tangguh Bencana di provinsi Riau secara umum telah mencapai tujuannya, namun selama pelaksanaan tahapan kegiatan telah menghadapi beberapa persoalan yang menjadi tantangan serius dalam mencapai tujuannya.

5.2.Saran

Berdasarkan analisis terhadap capaian pelaksanaan, hambatan yang telah dilalui, dan tantangan mendatang, maka rekomendasi untuk Program Destana tahun berikutnya adalah sebagai berikut.

1. Melengkapi perangkat lunak berupa pedoman dan petunjuk teknis pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan.
2. Melengkapi perangkat keras berusa peralatan pencegahan dan pemadam kebakaran.
3. Menyediakan anggaran untuk pelatihan (kontiniuitas) pengendalian kebakaran hutan bagi aparat pemerintah, tenaga relawan Desa dan perusahaan kehutanan serta masyarakat sekitar hutan
4. Kampanye dan penyuluhan melalui berbagai Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan.
5. Pemberian pembekalan kepada pengusaha (HPH, HTI, perkebunan dan Transmigrasi), Kanwil Dephut, dan jajaran Pemda oleh Menteri Kehutanan dan Menteri Negara Lingkungan Hidup.
6. Dalam setiap persetujuan pelepasan kawasan hutan bagi pembangunan non kehutanan, selalu disyaratkan pembukaan hutan tanpa bakar
7. Memberdayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkatan, serta melakukan pembinaan dan Pelatihan berkelanjutan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga dan I dan II

DAFTAR PUSTAKA

BNPB. (2012). *Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana*. https://bnpb.go.id/berita/perka-bnpb-no-1-2012-tentang-pedoman-umum-desa-kelurahan-tangguh-bencana

BNPB. (2014). *Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019*. BNPB. https://bnpb.go.id/documents/buku-renas-pb.pdf

BNPB. (2018). *RBI Risiko Bencana Indonesia*. BNPB. https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/Buku RBI_Final_low.pdf

Hasbullah, H., & Anam, S. (2019). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *9*(112–122). https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1413

Jaya, K. A., Safriadi, N., & Perwitasari, A. (2018). Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Aparatur di Kejaksaan Negeri Mempawah. *JUSTIN (Jurnal Sistem Dan Teknologi Informasi)*, *6*(1), 22–27. https://jurnal.untan.ac.id/index.php/justin/article/view/23314

Mendagri RI. (2007). *Permendagri No. 12 Th. 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan*. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Ditjen PMD) Kementerian Dalam Negeri RI. http://binapemdes.kemendagri.go.id/produkhukum/detil/no12th2007ttgpedomanpenyusunandanpendayagunaandataprofildesadankelurahan

Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, *5*(2), 1–14. https://ejournal.uksw.edu/scholaria/article/view/13

Pemerintah RI. (1999). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Presiden RI Dan DPR. https://www.walhi.or.id/undang-undang-republik-indonesia-nomor-41-tahun-1999-tentang-kehutanan

Pemerintah RI. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dn Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan*. Peraturan Pemerintah RI. https://www.bappenas.go.id/files/3613/5230/0903/sosialisasi__20081122063808__1.pdf

Ramadhani, Y. (2019). Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Dan Teknik Informatika "JISTI,"* *2*(2), 42–51. https://ojs.stmik.ypls.ac.id/index.php/jisti/article/view/38

Saharjo, B. H. (2003). *Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan yang Lestari Perlukan Dilakukan*. Laboratorium Kebakaran Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/MB/article/view/692

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Realisasi Biaya Penelitian

NO	KEBUTUHAN	JUMLAH BIAYA	SUB TOTAL
1	**Peralatan Pendukung**		
	Penelusuran Pustaka	Rp 300,000	
	Hardware (Modem)	Rp 500,000	
	Flashdisk	Rp 400.000	
			Rp 1.200,000
2	**Bahan Habis Pakai**		
	Kertas A4	Rp 200,000	
	Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp 200,000	
	Tinta Printer	Rp 400,000	
	Data Internet	Rp 500,000	
	Pulsa Telepon	Rp 500,000	
	Fotocopy	Rp 300,000	
			Rp 2,100,000
3	**Perjalanan**		
	Transportasi	Rp 1000,000	
			Rp 1.000,000
4	**Biaya Lain-lain**		
	Dokumentasi dan laporan	Rp 500,000	
			Rp 500,000
Total			**Rp 4,800,000**

Lampiran 2 Biodata Ketua Peneliti

1. Identitas Diri

a. Nama Lengkap dan Gelar : Ratih Setyo Rini, S.Sos., MM

b. NIDN : 0301077506

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Administrasi Bisnis

e Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

f. Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**
Nama Penguruan Tinggi	Universitas Indonesia	Universitas BSI Bandung
Tahun Lulus	1999	2013

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mandiri.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Peneliti

(Ratih Setyo Rini, S.Sos., MM)

NIP. 201101018

Lampiran 3 Biodata Anggota Peneliti

1. Identitas Diri

a. Nama Lengkap dan Gelar : Puji Yuniarti, S.E., M.M.

b. NIDN : 0315067703

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Administrasi Bisnis

e. Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

f. Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**
Nama Penguruan Tinggi	Universitas Trisakti	Universitas Trisakti
Tahun Lulus	2003	2007

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mandiri.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Peneliti,

(Puji Yuniarti, S.E., M.M.)

NIP. 200809800

Lampiran 4 Biodata Anggota Peneliti

1. Identitas Diri

a. Nama Lengkap dan Gelar : Wiwin Wianti, S.E.

b. NIDN : 0421107904

c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

d. Program Studi : Administrasi Perkantoran

e. Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

f. Jangka Waktu Penelitian : 8 Bulan

2. Riwayat Pendidikan

	S-1	**S-2**
Nama Penguruan Tinggi	Universitas Budi Luhur Jakarta	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Tahun Lulus	2009	2015

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Mandiri.

Jakarta, 1 Agustus 2021

Peneliti

(Wiwin Wianti, S.E., M.M.)

NIP. 200909593